

**PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KAMPUNG MENGKAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2017**

Oleh: Yuni Mardianti

Pembimbing : Baskoro Wicaksono S.IP, M.IP,

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the preparation of village development planning which is very important for the community in determining future development. In its development planning it is of inferior quality because it experiences constraints such as community participation is not maximal and does not favor the community. The presence of Musrenbang participants who were dominated by the village government and the ineffective development proposal from the number of Musrenbang participants. So that the formulation of the problem in this study is, why is the quality of planning and development of Mittings Village in Sungai Apit Sub-District of Siak in 2016-2017 less optimal. In addition, this study aims to describe the preparation of village development plans and find out which development priorities are less effective. The method used in this study is a descriptive approach to the type of qualitative research. This type of research data is primary data and secondary data. The data collection technique used is qualitative descriptive data analysis technique.

The results showed that the quality of village development planning preparation was still not good. This can be seen from a number of data obtained from the village of Mittings, sub-districts and field data collected. The right solution to overcome this problem is the need for support from the village government in increasing community participation in the form of socialization and direct involvement in the field and there needs to be an understanding in the form of motivation to the community to be more active in issuing opinions or proposals for development that are in line with the hopes and needs of the community .

Keywords: Planning Principles, Participation, Musrenbang.

A. Pendahuluan

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik sesuai tingkatannya, yaitu pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan (stakeholder). Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang diatur oleh undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Didalam musrenbang, ketiga komponen tersebut dapat saling memberikan informasi berkenaan dengan pembangunan yang memang dibutuhkan dan yang akan di prioritaskan.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 4 tahun 2012 tentang penyusunan perencanaan pembangunan pada pasal 4 ayat 2 di jelaskan:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan diperdesaan secara serius memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah didesa maupun masyarakat.
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya manusia.

¹ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (jakarta: Rajawali pers, 2016) hal. 6

Tabel 1.2
Daftar hadir musrenbang Kampung Mengkapan pada tahun
2016 dan 2017

No	Klasifikasi	Tahun 2016		Tahun 2017	
		di undang	yang hadir	yang di undang	yang hadir
1.	Pemerintah Kecamatan	7	3	13	4
2.	Pemerintah desa	10	6	12	7
3.	Lembaga Desa	8	8	15	12
4.	Tokoh Masyarakat	10	2	20	7
5.	Tokoh Agama	10	2	10	2
6.	Tokoh Pemuda	10	1	15	3
7.	Kelompok Perempuan	10	2	15	2
Jumlah/orang		65	25	100	42

Sumber : *Rekapitulasi Hasil Musrenbang kampung mengkapan tahun 2015-2016.*

Adapun identifikasi permasalahan yang peneliti dapatkan, yaitu :

- a. Kehadiran peserta musrenbang masih didominasi oleh Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung. Hal ini dapat dilihat dari daftar kehadiran musrenbang Kampung Mengkapan pada tahun 2016-2017, yang dilampirkan dalam tabel 1 dapat dilihat jumlah yang hadir pada tahun 2016 sebanyak 25 orang dari 65 orang yang diundang, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 42 orang dari 100 orang yang diundang.
- b. Prioritas Pembangunan Kampung dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 dalam daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan Kampung Mengkapan dari 3 usulan kegiatan

yang diprioritaskan hanya 1 yang mengalami perubahan dalam jangka waktu 2 tahun. Dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan Kualitas Perencanaan pembangunan Kampung Mengkapan masih dibawah standar.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu **Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2016-2017.**

1.3.2 Kerangka Teori

1.3.3 Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa

beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati.²

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk menemu kenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa menurut wahjudin sumpeno adalah :

- a) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- b) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- d) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka yang sama.
- e)

1.3.4 Kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan/Musrenbang

Kualitas musrenbang perlu diperbaiki guna mencapai suatu standar konsultasi publik yang baik dalam perencanaan partisipatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Meningkatkan kualitas fasilitator, antara lain bantuan teknis dan pelatihan fasilitator .

2. Memastikan representasi perempuan dan kelompok marginal sebagai stakeholder.
3. Meningkatkan keterkaitan dengan forum konsultasi multi stakeholder SKPD.
4. Meningkatkan kualitas dan kekinian informasi yang disediakan bagi peserta, termasuk informan tentang perkiraan anggaran.
5. Mendokumentasikan secara baik kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang
6. Pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu perumusan kebutuhan dan aspirasi stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan
7. Memperbaiki koordinasi waktu dan logistik musrenbang
8. Menciptakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas musrenbang seperti pengembangan indikator untuk memantau kinerja proses pasca musrenbang, seperti persentase usulan yang direalisasikan dalam APBD (terutama yang berkaitan dengan usulan perbaikan atau pengembangan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin).³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prioritas Usulan Pembangunan Kampung Mengkapan

3.2 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Mengkapan

3.2.1 Pemberdayaan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kampung

² Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Ekonomi Pembangunan*, (PT. Raja Grafindo persada, jakarta, tahun 2010) Hal 131.

³ Nandang suherman, "Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota" (perpustakaan nasional: tahun 2008)

Mengkapan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui PPK Kampung Mengkapan yang dengan program yang telah direncanakan. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang disingkat dengan PKK merupakan sebuah organisasi yang kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Beberapa kegiatan sering dilaksanakan oleh PKK Kampung Mengkapan, adapun salah satu program kegiatan yang sudah terlaksana ialah Pembuatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Kegiatan ini bertujuan untuk menegali potensi masyarakat pada bidang pertanian dan juga bertujuan menjadikan masyarakat yang lebih mandiri.

3.2.2 Perencanaan pembangunan partisipatif

Secara kuantitatif proses partisipatif memang jauh lebih sering dilakukan. Beberapa pengalaman kasus-kasus menunjukkan kualitas yang sangat tinggi tapi keberhasilan masih sangat tergantung pada ketertarikan persoalan bukan karena adanya perubahan sistem dan intensif.

Berikut kutipan dari Penghulu Kampung Mengkapan yaitu menyatakan :

“Kualitas perencanaan pembangunan itu tergantung dari masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat itu banyak yang ikut berpartisipasi dan tidak mengabaikan undangan dari pemerintah desa maka kualitas perencanaan pembangunan itu akan terjadi sesuai kehendak masyarakat itu sendiri”. (wawancara dengan Bapak Nawawi tanggal 29 April 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat, dimana kurangnya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat kampung mengkapan. jika masyarakat Kampung Mengkapan banyak ikut berpartisipasi tidak menutup kemungkinan perencanaan pembangunan akan terjadi sesuai dengan kehendak mereka.

3. 2.3 Berpihak Pada Masyarakat

Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa.⁴

Dilihat dari proses musrenbang Kampung Mengkapan dan hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pemerintah kampung memberikan informasi musrenbang melalui undangan saja kepada peserta musrenbang tanpa diumumkan secara terbuka. Dengan pertimbangan bahwa konsep sistem keterbukaan perencanaan dalam pembangunan yang konsektual memberikan nilai tambah, yaitu perencanaan dirumuskan atas dasar nilai dan efektivitas dan efisiensi, bukan atas dasar kepentingan pribadi. Pendekatan pembangunan di kampung dirasakan lebih kontekstual dengan anggapan bahwa faktor-faktor lingkungan dan sumber daya masyarakat adalah sangatlah penting, sehingga dalam sumber daya masyarakat, proses pembangunan lebih menekan kepada

⁴ Wahyudin Kessa, " Perencanaan Pembangunan Desa "(Jakarta:maret 2015), hal.58

adanya proses pembelajaran kepada masyarakat setempat.

1.2.4 Terbuka

Keterbukaan yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cara masyarakat berpartisipasi dalam penentuan alternatif masalah yaitu kurang adanya sistem keterbukaan dalam proses musrenbang. Dengan pertimbangan bahwa konsep sistem keterbukaan perencanaan dalam pembangunan pedesaan yang konseptual memberikan nilai tambah, yaitu perencanaan dalam pembangunan dirumuskan atas dasar nilai efektivitas dan efisiensi, bukan atas dasar kepentingan. Pendekatan pembangunan pedesaan dirasakan lebih konseptual dengan anggapan bahwa faktor-faktor lingkungan dan sumber daya masyarakat adalah sangat penting, sehingga dalam sumber daya masyarakat, proses pembangunan lebih menekankan kepada adanya proses pembelajaran kepada masyarakat setempat.

1.2.5 Akuntabel

Yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan desa maupun pada masyarakat.⁶

Berikut wawancara dengan bapak Azwar Kerani Mengkapan

“yang hadir dapat dikatakan sedikit Cuma kami-kami saja staff pemerintah kampung mengkapan, LPM, bapekam, dan juga masyarakat yang tidak hadir terkiat dalam musrenbang mereka memiliki alasan masing-masing atas ketidakhadirannya dan kami pun harus memakluminya. (wawancara dengan kerani kampung mengkapan pada tanggal 29 April 2019).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa diketahui masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan berbagai alasan masing-masing dan pemerintah kampung mengkapan itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya memakluminya saja.

1.2.6 Selektif

Selektif merupakan semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Kampung Mengkapan menyiapkan program yang optimal dengan memastikan program yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan memperoleh hasil yang selektif. Namun, jika melihat data dan fakta yang terjadi peneliti beranggapan bahwa perencanaan dan pembangunan di Kampung Mengkapan belum dapat dikatakan optimal. hal itu disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat

⁵ Wahyudin Kessa, " *Perencanaan Pembangunan Desa* " (Jakarta: maret 2015), hal.19

⁶ Perda Siak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan

⁷ Perda Siak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan

dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

1.2.7 Efisiensi dan Efektif

Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.⁸

Berikut wawancara dengan Bapak Azwar kerani Mengkapan

“Kekompakan antar lembaga satu sama lain masih kurang baik dalam menghadiri forum musrenbang, karena masih ada anggota lpm maupun anggota bapendam yang tidak ikut dalam forum musrenbang kampung, maupun dilihat saat forum musrenbang terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat antar lembaga yang satu dengan yang lain maupun dengan aparat kampung itu sendiri dalam merumuskan usulan prioritas pembangunan tersebut. (wawancara dengan kerani mengkapan pada tanggal 29 April 2019).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa salah satu mengapa kualitas musrenbang di Kampung Mengkapan tidak berjalan dengan lancar yaitu lemahnya kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan Kampung Mengkapan seperti anggota Bapendam dan anggota LPM maupun masih kurangnya pengetahuan mereka tentang musrenbang sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang baik untuk perencanaan pembangunan. dan juga diketahui bahwa kurangnya

kekompakan antar lembaga yang satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu proses musrenbang kampung tersebut dan hasil yang diperoleh belum efisien dan efektif serta belum maksimal.

Jika dilihat dari semua hasil observasi diatas penulis menyimpulkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan Kampung Mengkapan kurang baik atau tidak berjalan dengan lancar berdasarkan prinsi-prinsip musyawarah perencanaan pembangunan yang sudah dijelaskan diatas yaitu pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, keterbukaan, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa : Prioritas usulan pembangunan Kampung Mengkapan kurang efektif karena dari jumlah peserta musrenbang yang hadir tidak sesuai dengan usulan yang diharapkan. Dan realisasi pembangunan Kampung Mengkapan sangat berbeda jauh dari usulan yang dihasilkan dalam musrenbang Kampung Mengkapan tersebut. Kualitas perencanaan pembangunan Kampung Mengkapan masih kurang baik karena dalam perencanaan pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat Kampung Mengkapan masih didominasi oleh aktor formal dan minim sekali keterlibatan aktor informal. Jadi, penyusunan perencanaan pembangunan kampung mengkapan kurang berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat

⁸ Siagian, Sondang P, “ Teori Pengembangan Organisasi”(Jakarta: 2007)Hal. 34.

dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2016-2017.

4.2 Saran

Untuk menciptakan kualitas perencanaan pembangunan kampung, maka ada beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan :

1. Untuk pemerintah kampung
Bagi pemerintah kampung disarankan kedepannya memberikan dukungan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat seperti sosialisasi atau terjun langsung kelapangan serta pemerintah kampung disarankan untuk kedepannya lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan usulan dengan anggran supaya tidak banyak perbedaan usulan dengan realisasi yang dihasilkan.
2. Untuk unsur masyarakat kampung
Bagi unsur masyarakat kampung disarankan untuk lebih mengontrol kembali kinerja pemerintah kampung, lebih aktif lagi didalam menyampaikan usulan yang ingin disampaikan, agar kepentingan yang merupakan kebutuhan masyarakat tersebut dapat terealisasi dan tentunya dapat memengaruhi suatu pengambilan kebijakan

pada musrenbang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta. Granit.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ateng Syafruddin dan Suprin 2010. *Republik Desa*. Bandung Jakarta:Pustaka Harapan.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta. UGM.
- Hendratno, 2009. *Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Yogyakarta : UGM.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Cetakan Pertama.
- Komaruddin, 2006. *Efisiensi, Efektifitas Dan Ekonomisasi Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang : Bayu Media dan UMM.
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Nandang suherman, 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan*

- Kabupaten/Kota :
perpustakaan nasional
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta : Erlangga
- P. Siagian, 2011. *Pembangunan Jangka Panjang*. Yogyakarta, Caps.
- Rianingsih, Djohani. 2008. *Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa*. Massetra.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. PT. Raja Gravindo Persada.
- Silalahi, Urber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Sjafrizal, 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali
- Subiyantoro, Arif. 2007. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumpeno, Wahyudin. 2004. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Indonesia.
- Syahrudin, 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dala Perspektif Undang-Undang*. Jakarta
- Perundang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Mentri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
- Skripsi**
- Alfa Yeni. 2018. *“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tengah (Studi Alokasi Dana Desa di Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2016”*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Algi Fajri, 2018. *Peranan pemimpin informal dalam pembangunan desa (studi di desa pulau terap kecamatan kuok kabupaten kampar tahun 2014)*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Nofriko Hendra. 2018. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Jambi Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)”*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerntahan, Universitas Riau. Pekanbaru.
- M. Rafi, 2018. *Deliberasi dalam perencanaan pembangunan desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan*

Meranti Tahun 2014-2015.
Skripsi. FISIP, Ilmu
Pemerintahan, Universitas
Riau. Pekanbaru.

Sumber lain

Arifin. Mahasiswa pascasarjana.
*Universitas Sumatra
Utara Dalam Jurnal
Ilmiahnya Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif* (studi
tentang penyusunan
rencana jangka
menengah daerah kota
medan tahun 2006-
2010).

Harry Cristian, "*Studi Tentang
Pelaksanaan Rencana*

*Kerja Pembangunan
Desa (Rkpdes) Tahun
2013 Disesa Loa Janan
Ulu Kecamatan Loa
Janan Kabupaten Kutai
Kartanegara*". Volume
3 No. 1, 2015.

Utami dewi, "perencanaan
pembangunan desa"
pendekatan *learning
and participatory
proces*.

Rihandoyo, Mahasiswa Pascasarjana.
Universitas Diponegoro Dalam
Jurnal Ilmiahnya "*Aktualisasi Peran
Serta Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan
Daerah*".